



**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**( LKjIP )**

**TAHUN ANGGARAN 2017**

**DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN KEDIRI**  
**TAHUN 2017**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun 2017.

LKjIP merupakan dokumen yang menjadi salah satu komponen dari siklus akuntabilitas yang dimulai dari perencanaan strategis dan diakhiri dengan penyusunan LKjIP.

LKjIP yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 serta dokumen Renja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun 2017 ini, adalah perwujudan akuntabilitas kinerja yang tercermin dari hasil pencapaian kinerja sesuai Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan.

Sebagai salah satu dokumen evaluasi kinerja, melalui LKjIP ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang kebijakan dan program, sehingga dalam perumusan kebijakan dan program ke depannya dapat lebih tepat sasaran dan implementatif.

Selain itu, melalui LKjIP ini akan dapat dicermati kendala yang ada dalam mengimplementasikan program dan kegiatan, mengetahui penyebab kegagalan sekaligus merumuskan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Demikian LKjIP Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun 2017 ini, diharapkan semua pihak yang mendukungnya mampu melakukan evaluasi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik melalui upaya peningkatan pelaksanaan tugas dengan penuh tanggung jawab. Semoga LKjIP ini bermanfaat dan dapat dijadikan pedoman serta ditindaklanjuti oleh semua pihak.

Kediri, Desember 2017

KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KEDIRI



**EDY YUWONO, MT**

Pembina Tk. I

NIP. 19610806 198903 1 017

**DAFTAR ISI**

BAB 1	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang .....	1
	B. Gambaran Umum SKPD.....	2
	C. Maksud dan Tujuan .....	4
	D. Dasar Hukum .....	4
	E. Aspek-aspek Strategis .....	5
	F. Isu-isu Strategis .....	6
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA	
	A. Rencana Strategis .....	7
	B. Perjanjian Kinerja .....	9
	C. Program dan Kegiatan .....	10
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA	
	A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi/Sasaran .....	19
	B. Analisa Capaian Kinerja berdasarkan Target dan Realisasi Tahun 2017 .....	20
	C. Realisasi Anggaran .....	26
BAB IV	: PENUTUP	
	A. Keberhasilan Kegiatan .....	27
	B. Permasalahan dan Kendala Utama yang berkaitan dengan pencapaian kinerja .....	27
	C. Solusi/langkah yang diambil untuk meningkatkan kinerja .....	27
	D. Saran .....	28

## Lampiran-lampiran :

1. Matriks Renstra SKPD Tahun 2016-2021
2. Rencana Kinerja Tahunan 2017
3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017
4. Pengukuran Kinerja Tahun 2017

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan pada sektor wajib layanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman, sektor pilihan sumber daya air dan mineral serta bidang pertanahan di Kabupaten Kediri merupakan bagian integral pembangunan di wilayah Provinsi Jawa Timur dan Nasional, yang secara konseptual direncanakan serta disusun sebagai penjabaran rencana pembangunan nasional dengan memperhatikan potensi dan kondisi serta prioritas daerah. Dalam peranannya, sektor wajib layanan dasar perumahan rakyat dan kawasan permukiman khususnya di bidang perumahan dan kawasan permukiman sangat diharapkan menjadi komponen pendukung infrastruktur sebagai pemicu/pembangkit pertumbuhan perekonomian daerah dan masyarakat menuju kesejahteraan baik di wilayah Kabupaten Kediri pada khususnya, dan Jawa Timur serta Nasional pada umumnya, sedangkan di sektor sumber daya air dan mineral khususnya di bidang Penerangan Jalan Umum (PJU), dan bidang pertanahan sangat diharapkan menjadi komponen pendukung.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program-program pembangunan di bidang perumahan rakyat khususnya di lingkup Sub Bidang Perumahan dan Cipta Karya serta di Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, serta agar tetap mampu menjadi penunjang dan pendukung infrastruktur yang sangat dinamis, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil atau outcome.

Kondisi yang diinginkan ke depan adalah infrastruktur perumahan rakyat disamping memenuhi standar minimal pelayanan fungsi strukturalnya, juga memenuhi aspek pendukung yang lainnya, sekaligus menjadi ruang publik yang aman dan nyaman. Hal tersebut merupakan tantangan bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk selalu meningkatkan kinerja disetiap tahunnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan yang harus dapat dijawab untuk meningkatkan pelayanan infrastruktur perumahan rakyat dan kawasan permukiman kepada masyarakat, pelayanan PJU serta bidang pertanahan dan kawasan permukiman kumuh. Isu dan permasalahan yang mendesak yaitu amanat UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN yang mengamanatkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat melalui penyediaan akses air minum sebesar 100%, terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh serta pemenuhan sanitasi layak pada tahun 2020, dikenal dengan istilah 100-0-100.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam suatu kegiatan pembangunan daerah perlu menentukan cara guna peningkatan pelaksanaan pengadministrasian yang tertib, sistematis dan berkelanjutan untuk mencapai hasil yang maksimal bagi instansi / unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

## **B. Gambaran Umum SKPD**

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, merupakan dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, pada pasal 2 ayat (1) ditetapkan kedudukan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan urusan pemerintahan di bidang Pertanahan.

Adapun kedudukan, tugas dan fungsi serta struktur organisasi Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri diuraikan sebagai berikut :

### **1. Tugas, Fungsi dan struktur organisasi**

#### **a. Tugas**

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2016, Tugas pokok Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sesuai pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

#### **b. Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
3. Pelaksanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;

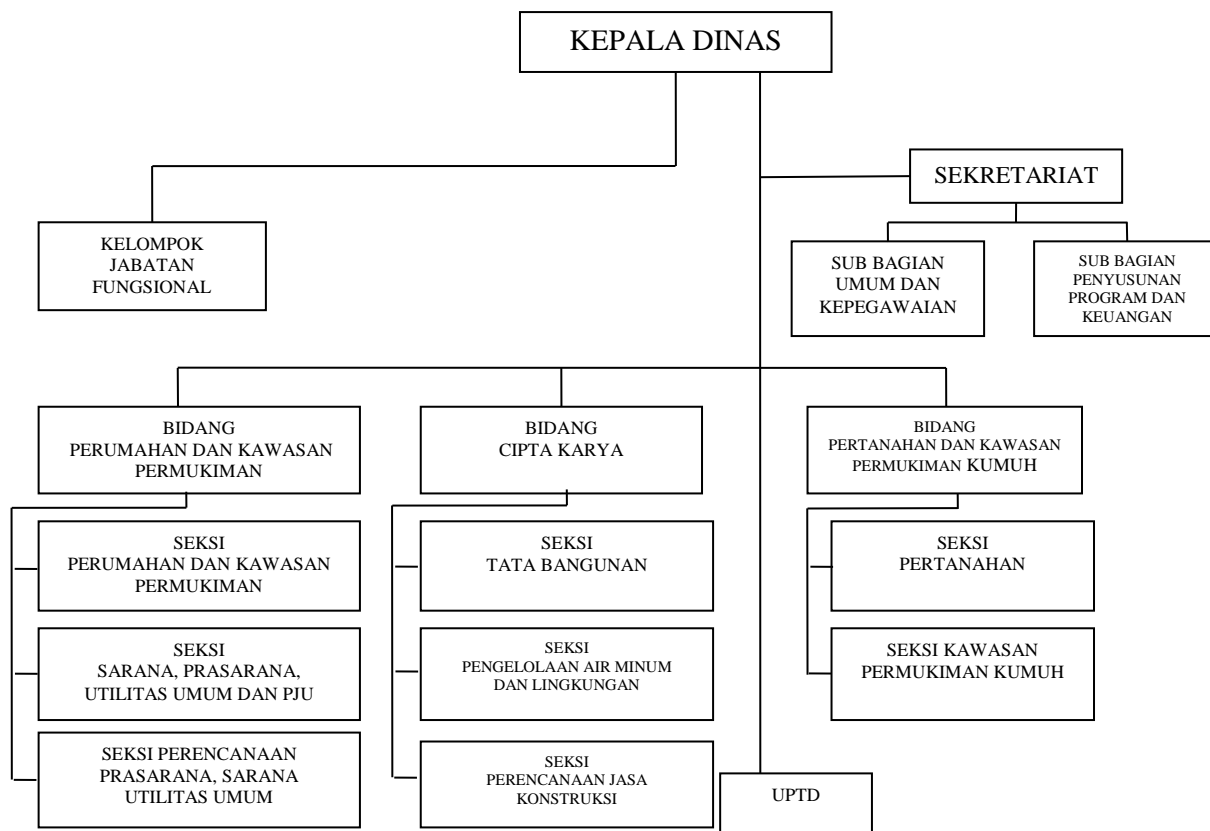
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
6. Pembinaan penyelenggaraan dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
7. Pembinaan UPTD;
8. Pelaksanaan administrasi dibidang perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan;
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**c. Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  2. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.
- c. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahi :
  1. Seksi Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  2. Seksi Sarana, Prasarana, Utilitas Umum dan Penerangan Jalan Umum; dan
  3. Seksi Perencanaan Prasarana, Sarana Utilitas Umum.
- d. Bidang Cipta Karya, membawahi :
  1. Seksi Tata Bangunan;
  2. Seksi Pengelolaan Air Minum dan Lingkungan; dan
  3. Seksi Perencanaan Jasa Konstruksi.
- e. Bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, membawahi :
  1. Seksi Pertanahan; dan
  2. Seksi Kawasan Permukiman Kumuh.
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman digambarkan sebagai berikut :



### C. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 disusun dengan maksud sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri selama tahun 2017. Tujuan pembuatan LKjIP SKPD adalah sebagai berikut :

1. Bahan evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, Povinsi, Pusat maupun Masyarakat ;
2. Memberikan informasi capaian sasaran pembangunan daerah guna penyempurnaan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2016-2021) ;
3. Sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan datang ;
4. Merupakan media dalam upaya menyempurnakan kebijakan dalam rangka menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi ;
7. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2005-2025 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017 ;
16. Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri ;
17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 27 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2017.

#### **E. Aspek-aspek Strategis**

##### **1. Analisis Faktor Internal**

1. Peraturan Bupati Kediri Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri;



2. Tersedianya sumber Daya Manusia di bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan bidang pertanahan;
  3. Tersedianya alokasi dana yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.
2. Analisis Faktor Eksternal
1. Tersedianya potensi Sumber Daya Air;
  2. Adanya kebijakan pemerintah di bidang perumahan dan kawasan permukiman;
  3. Adanya HIPPAM sebagai kelompok pemanfaat Air Minum;
  4. Tersedianya dana di Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
  5. Banyaknya tempat yang belum terpasang PJU.
  6. Adanya kebijakan pemerintah terkait pembangunan/rehabilitasi gedung negara.

#### F. Isu-isu Strategis

Isu-isu strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri berdasarkan Renstra tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Menurunnya ketersediaan air akibat degradasi lingkungan untuk memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan air minum;
2. Rendahnya sarana dan prasarana dasar permukiman;
3. Masih banyaknya masyarakat yang memiliki Rumah Tidak layak Huni (RTLH);
4. Rendahnya kualitas gedung negara;
5. Masih adanya kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Kediri;
6. Belum terdatanya tanah-tanah negara dan masih banyaknya konflik-konflik pertanahan;
7. Kurangnya kompetensi aparatur di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang berpengaruh terhadap pencapaian *good governance*.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja disusun sebagai pedoman bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 (lima) tahun secara sistematis, terarah dan terpadu dengan memperhitungkan analisis situasi, kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman serta isu-isu strategis. Dalam perencanaan kinerja disusun suatu tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang disesuaikan dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya yang tersedia.

#### A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis adalah merupakan proses sistematis yang berkelanjutan dari pembuatan keputusan yang beresiko, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif dan pengorganisasian secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasilnya melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut : ***“TERWUJUDNYA KETAHANAN PANGAN BAGI MASYARAKAT KABUPATEN KEDIRI YANG RELIGIUS, CERDAS, SEHAT, SEJAHTERA, KREATIF, DAN BERKEADILAN, YANG DIDUKUNG OLEH APARATUR PEMERINTAH YANG PROFESIONAL”***

Untuk mewujudkan Visi tersebut diatas, maka rumusan misi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi segenap komponen untuk mengarah pada pencapaian kondisi akhir sebanyak 15 misi yaitu :

1. Melaksanakan ajaran agama dan/atau kepercayaan dalam kehidupan bermasyarakat yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmoni.
2. Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan dalam lingkungan masyarakat yang tertib dan aman.
4. Menumbuhkembangkan layanan pendidikan murah (terjangkau) dan berkualitas pada semua jenis, jenjang dan jalur pendidikan.
5. Mewujudkan masyarakat yang mandiri dan berkeadilan di bidang kesehatan.
6. Menumbuhkembangkan kreatifitas, produktifitas dan pendapatan masyarakat melalui kebijakan ekonomi kerakyatan dengan memajukan industri menengah, kecil dan mikro.

7. Melanjutkan pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan sebagai upaya meningkatkan ekonomi masyarakat dan melestarikan budaya daerah.
8. Mengembangkan koperasi sebagai salah satu soko guru pembangunan ekonomi kerakyatan.
9. Mengoptimalkan pelayanan perizinan bagi kepentingan kehidupan masyarakat, terutama dalam menggiatkan investasi dan dunia usaha.
10. Memantapkan pembangunan kependudukan yang meliputi ketertiban sistem pendataan dan pemberdayaan warga masyarakat terutama wilayah pedesaan, khususnya kaum perempuan.
11. Mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.
12. Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang.
13. Membangun dan mengembangkan jaringan sistem informasi dan komunikasi.
14. Meningkatkan pembangunan lingkungan hidup yang sehat, serasi dan seimbang.
15. Pembangunan sektor ketenagakerjaan untuk kesejahteraan masyarakat.

Misi Kepala Daerah yang ke 12 (dua belas) yaitu **Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang**, sangat terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai dinas teknis yang bertanggungjawab atas penyediaan perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ketersediaan infrastruktur perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan yang handal dan berkualitas merupakan faktor penting dalam pencapaian Misi Kepala Daerah yang ke-12.

Berpedoman visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri tersebut, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri mempunyai tujuan yaitu **"Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman"** dan sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih
- b. Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan, mencakup :
  1. Meningkatnya KK yang memiliki Rumah Layak Huni
  2. Meningkatnya PJU dalam kondisi baik
  3. Meningkatnya bangunan pemerintahan layak fungsi
  4. Luasan kawasan kumuh yang tertangani

Sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dari Pemerintah Kabupaten Kediri, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri akan secara aktif ikut mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kediri dengan tetap berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2021 yang secara sistematis dan berkesinambungan harus memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Untuk itu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri perlu menata semua komponen yang terlibat dalam mendukung pelaksanaannya baik personil, sarana prasarana, anggaran yang tersedia serta piranti lunak lainnya untuk dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Penataan komponen pendukung salah satunya dapat dilakukan melalui penyusunan rencana program kerja tahunan SKPD dengan menetapkan Tujuan, Sasaran dan Program Kerja yang akan dipedomani sebagai dasar pelaksanaan tugas pokok dan fungsi bagi personil dalam mengoperasionalkan semua potensi yang ada guna mewujudkan hasil yang direncanakan.

Dengan pertimbangan di atas, maka Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri dapat menyusun Rencana Strategis untuk Tahun 2016-2021 sebagai pedoman dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan 2021 dengan memuat tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2021. Adapun Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri Tahun 2016-2021 secara terperinci sebagaimana dalam “Lampiran 1. Matriks Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri Tahun 2016-2021”.

## B. Perjanjian Kinerja

Rencana Kinerja Tahun 2017 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri adalah penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri Tahun 2016-2021. Rencana kinerja tersebut diuraikan dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, yang merupakan komitmen Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran dan tujuan selama Tahun 2017. Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri dan keselarasannya dengan pencapaian misi RENSTRA 2016-2021 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja Tahun 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formula Perhitungan	Target 2017
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih	Jumlah rumah tangga/KK yang terlayani air bersih dibagi jumlah KK di Kab. Kediri x 100	65%
2	Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan	Persentase KK yang memiliki rumah layak huni	Jumlah Rumah/KK layak huni dibagi jumlah KK di Kab. Kediri x 100	72%

		Persentase PJU dalam kondisi baik	Jumlah PJU yang menyala dan baik dibagi Jumlah PJU yang ada x 100	80%
		Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi	Jumlah bangunan gedung pemerintahan layak fungsi dibagi Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang ada x 100	65%
		Luasan kawasan Kumuh yang tertangani	Luas kawasan kumuh yang tertangani (Ha)	6,5 Ha

Selain indikator yang tertuang dalam Renstra Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri, Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

## Indikator Kinerja yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi Perhitungan	Target 2017
1	Meningkatnya sarana infrastruktur daerah	Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak	Jumlah penduduk pengguna air minum yang memenuhi syarat/Jumlah penduduk X 100%	65%
		Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	Luas kawasan kumuh yang ditangani/luas kawasan kumuh yang ada X 100%	75%

## C. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang telah ditetapkan, diambil kebijakan-kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam program dan kegiatan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
4. Program Pengembangan Perumahan.
5. Program Lingkungan Sehat Perumahan.
6. Program penataan penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.

7. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan.
8. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan.
9. Program penyelesaian konflik konflik pertanahan.
10. Program Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan.
11. Program Pembangunan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum.
12. Program Pembangunan Saluran Drainase.
13. Program Pelayanan Administrasi Umum.
14. Program pembangunan infrastruktur perdesaan.
15. Program pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum/pemerintah.
16. Pembangunan rumah sakit.
17. Program pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Penyediaan jasa surat menyurat.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.  
Anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk pembayaran rekening telepon.
3. Penyediaan jasa administrasi keuangan.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor.
5. Penyediaan alat tulis kantor.
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.
7. Penyediaan komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor.
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.  
Anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk pengadaan papan nama, AC, komputer, printer, scanner dan kamera digital.
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan.
10. Penyediaan makanan dan minuman.
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah.
12. Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran / teknis perkantoran.
13. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah.
14. Penyediaan jasa administrasi barang.
15. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.
16. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor.
17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah.
18. Penyusunan pelaporan rencana kerja.
19. Penyusunan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal.
20. Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
21. Penyusunan Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.

22. Fasilitasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP).
23. Pendukung penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat. Anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai oleh pemerintah pusat yaitu program PAMSIMAS. Sasaran desa PAMSIMAS untuk tahun 2017 sebanyak 10 desa yaitu sebagai berikut :
  - a. PAMSIMAS APBN
    1. Ds. Puhsarang Kec. Semen (KKM Tirto Kamandanu)
    2. Ds. Puhrubuh Kec. Semen (KKM Bagrug Asri)
    3. Ds. Kampungbaru Kec. Kepung (KKM Tirto Mulyo)
    4. Ds. Petok Kec. Mojo (KKM Sumber Makmur)
    5. Ds. Pamongan Kec. Mojo (KKM Sumber Wilis)
    6. Ds. Joho Kec. Semen (KKM Podang Makmur)
    7. Ds. Ploso Kec. Mojo (KKM Ploso Semini)
    8. Ds. Surat Kec. Mojo (KKM Surat Bersemi)
  - b. Bansos Pamsimas APBD
    1. Ds. Jugo Kec. Mojo (HIPPAM Jugo Asri)
    2. Ds. Ponggok Kec. Mojo (HIPPAM Pandan Sari)
24. Penyuluhan hukum pertanahan.
25. Inventarisasi Tanah Negara.
26. Pendukung Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh.
27. Pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum (PJU).
28. Penataan beban kelistrikan (PJU).
29. Pembangunan penerangan jalan umum.
  - Perencanaan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Se Wilayah Kab. Kediri
  - Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) se Wilayah Kab.Kediri
  - Pengawasan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) Kab.Kediri
30. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
31. Pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan penerangan jalan umum.
  - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF sebanyak 1 unit
32. Pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya.
  - Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (TS) di wilayah Kab. Kediri
33. Fasilitasi penyelesaian konflik konflik pertanahan.
34. Perencanaan Pembangunan Gedung Pemerintahan.
  - Perencanaan Teknis Review DED Pembangunan Gedung Sekretariat Dewan Kab.Kediri

35. Pembangunan Gedung Pemerintahan.
  - Pembangunan Gedung Kantor BPKAD dan Infrastruktur Pendukung Kabupaten Kediri
  - Pekerjaan Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Kantor BPKAD Kab.Kediri
36. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan.
37. Rehabilitasi Gedung Pemerintahan.
  - Rehabilitasi Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) Tahap I
  - Pengawasan Rehabilitasi Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) Tahap I
38. Perencanaan Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum.
  - Perencanaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum/Air Bersih Dana DAK Kab.Kediri
39. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum.

Pelaksanaan pekerjaan fisik sebanyak 8 paket sebagai berikut :

  - 1) Pembangunan SPAM Desa Bukur Kec. Kandangan Kab. Kediri
  - 2) Pembangunan SPAM Desa Banaran Kec. Kandangan Kab. Kediri
  - 3) Pembangunan SPAM Desa Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri
  - 4) Pembangunan SPAM Desa Jerukgulung Kec. Kandangan Kab. Kediri
  - 5) Pembangunan SPAM Ds. Tarokan Kec. Tarokan Kab. Kediri
  - 6) Pembangunan SPAM Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri
  - 7) Pembangunan SPAM Ds. Parang Kec. Banyakan Kab. Kediri
  - 8) Pembangunan SPAM Ds. Jerukwangi Kec. Kandangan Kab. Kediri

Pelaksanaan pekerjaan pengawasan sebanyak 2 paket yaitu :

  - a. Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kab. Kediri
  - b. Jasa Konsultasi Pengawasan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kab. Kediri
40. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
  - Pembangunan Sumur Uji IKK Ngancar Kab.Kediri
  - Optimalisasi SPAM IKK Grogol akibat bencana banjir bandang
  - Pengawasan Optimalisasi SPAM Kab.Kediri
41. Perencanaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
  - Jasa Konsultasi Perencanaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum/ Bersih Kab. Kediri
42. Pembinaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPAM)
43. Pembangunan Saluran Drainase
  - 1) Pembangunan Saluran Drainase Desa Petok Kec.Mojo Kab.Kediri
  - 2) Pembangunan Saluran Drainase Desa Tulungrejo Kec.Pare Kab.Kediri
  - 3) Pembangunan Saluran Drainase Ds.Padangan Kec.Kayen Kidul Kab.Kediri



- 4) Pembangunan Saluran Drainase Desa Paron Kec.Ngasem Kab.Kediri
  - 5) Pembangunan Saluran Drainase Desa Mondo Kec.Mojo Kab.Kediri
  - 6) Pembangunan Saluran Drainase Ds.Mlati Kec.Mojo Kab.Kediri
  - 7) Pengawasan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Permukiman Kab.Kediri
44. Perencanaan Saluran Drainase.
- Perencanaan Teknis Pembangunan Saluran Drainase Permukiman Kabupaten Kediri
45. Penyediaan Jasa Rekening Listrik PLN ( PJU).
- Pembayaran rekening listrik PJU (PLN Area Kediri)
  - Pembayaran rekening listrik PJU (PLN Area Mojokerto)
46. Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan.
- Jasa Konsultasi Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan Paving Permukiman Kab. Kediri
47. Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan.
- 1) Pembangunan Jalan Paving Ruas Jalan Galuh dan Ruas Watugede Ds,Kandat Kec.Kandat Kab.Kediri
  - 2) Pembangunan Jalan Paving Ruas Jalan Taruna Ds.Jambu Kec.Kayen Kidul Kab.Kediri
  - 3) Pembangunan Jalan Paving Ruas Jalan Selosari Ds.Kandat Kec.Kandat
  - 4) Pengawasan Teknik Pembangunan Jalan Paving Kab.Kediri
48. Pembangunan pasar sayur.
- Pembangunan Pasar Grosir Komoditi Sayur, Buah dan Pangan Pare
  - Jasa Konsultan Pengawasan Pembangunan Pasar Grosir Komoditi Sayur, Buah dan Pangan Pare
49. Pembangunan rumah sakit.
- Pembangunan RSUD Simpang Lima Gumul Tugurejo Kabupaten Kediri (Tahap II)
  - Jasa Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan RSUD SLG Tugurejo Kabupaten Kediri Tahap 2
  - Konsultan Ahli Hukum Kontrak Pembangunan RSUD SLG Tugurejo Kab. Kediri
50. Perencanaan Pembangunan rumah sakit.
- Perencanaan Teknis DED Sarana Pendukung RSUD SLG Tugurejo Kab.Kediri
51. Penunjang Pengadaan Barang / Jasa.

Demikian program dan kegiatan yang ingin dicapai oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, semoga dapat terlaksana sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tabel 2.3

## Program, Kegiatan, Indikator Output dan Outcome masing-masing Kegiatan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME
<b>A</b>	<b>Program Pelayanan administrasi perkantoran</b>		<b>Cakupan pelayanan administrasi perkantoran (100%)</b>
1	Penyediaan jasa surat menyurat	Waktu penyediaan jasa surat menyurat selama 12 bulan	Prosentase terciptanya kelancaran kegiatan surat-menyurat di lingkungan dinas
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi selama 12 bulan	Prosentase tersedianya sarana komunikasi dan speedy untuk kelancaran kerja
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Waktu penyediaan administrasi jasa keuangan selama 12 bulan	Prosentase terselesainya tugas administrasi keuangan dengan baik dan tepat waktu
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Waktu penyediaan jasa kebersihan kantor selama 12 bulan	Terwujudnya suasana kerja yang nyaman dan bersih
5	Penyediaan alat tulis kantor	Waktu penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan	Terpenuhinya alat tulis kantor selama setahun
6	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Waktu penyediaan barang cetakan dan penggandaan selama 12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan dokumen dinas
7	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Waktu penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor selama 12 bulan	Terpenuhinya kebutuhan alat listrik kantor
8	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia sebanyak 11 buah	Prosentase terpenuhinya peralatan dan perlengkapan kantor
9	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan selama 12 bulan	Terpenuhinya bahan bacaan/surat kabar
10	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman rapat sebanyak 360 orang	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat-rapat dinas dan pertemuan
11	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebanyak 20 kali	Terpenuhinya kepentingan perjalanan dinas rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
12	Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran	Jumlah tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknis Perkantoran sebanyak 3 orang	Terselesainya laporan kearsipan secara rutin
13	Rapat-Rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah sebanyak 60 kali	Terpenuhinya biaya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam daerah
14	Penyediaan Jasa Administrasi Barang	Waktu penyediaan jasa adm. Barang selama 12 bulan	Terciptanya kelancaran pekerjaan adm. barang
<b>B.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>		<b>Cakupan peningkatan sarana dan prasarana aparatur (90%)</b>
1	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasional yang dipelihara rutin/berkala sebanyak 10 kendaraan	Prosentase usia pakai kendaraan dinas/operasional lebih awet dan terawat
2	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah dan jenis peralatan gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala selama 12 bulan	Prosentase terawatnya peralatan gedung kantor

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME
<b>C.</b>	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>		<b>Persentase dokumen perencanaan dan keuangan selesai tepat waktu dan sesuai pedoman (90%)</b>
1	Penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 4 buku	Persentase dokumen pelaporan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai pedoman
2	Penyusunan Pelaporan Rencana Kerja	Jumlah laporan rencana kerja sebanyak 6 buku	Persentase dokumen perencanaan yang sesuai pedoman
3	Peyusunan Pelaporan Standar Pelayanan Minimal	Jumlah Pelaporan SPM sebanyak 1 SPM	Persentase dokumen pelaporan SPM yang sesuai pedoman
<b>D.</b>	<b>Program pengembangan perumahan</b>		<b>Persentase MBR yang memiliki Rumah Layak Huni (70%)</b>
1	Verifikasi Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Jumlah pelaksanaan verifikasi penyerahan PSU perumahan dan permukiman sebanyak 10 kali	Prosentase terlaksananya verifikasi penyerahan PSU Perumahan dan permukiman
2	Penyusunan Raperda Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman	Tersusunnya Raperda penyerahan PSU perumahan dan permukiman sebanyak 1 Raperda	Prosentase tersusunnya raperda penyerahan PSU Perumahan dan permukiman
3	Fasilitasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP)	Terlaksananya fasilitasi Program BSPS untuk 439 unit rumah	Persentase KK yang memiliki Rumah Layak Huni (72%)
<b>E.</b>	<b>Program Lingkungan Sehat Perumahan</b>		<b>Persentase sarana air bersih yang terbangun (100%)</b>
1	Pendukung penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat	Jumlah desa/lokasi penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat (PAMSIMAS) sebanyak 10 desa	Persentase sarana air bersih yang terbangun (Pamsimas)
<b>F.</b>	<b>Program penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah</b>		<b>Capaian pelayanan bidang pertanahan (100%)</b>
1	Penyuluhan hukum pertanahan	Pelaksanaan penyuluhan pertanahan sebanyak 1 kali	Persentase capaian pelayanan bidang pertanahan
2	Inventarisasi tanah negara	Tersedianya data tanah negara (1 buku)	Persentase capaian pelayanan bidang pertanahan
<b>G.</b>	<b>Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan</b>		<b>Capaian pendukung Program "Kota Ku" (100%)</b>
1	Pendukung kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh	Terlaksananya pendukung kegiatan "Kota Ku" untuk 3 desa	Luas kawasan kumuh yang tertangani (6,5 Ha)
<b>H.</b>	<b>Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan</b>		<b>Jumlah lampu PJU yang menyala (3600 unit)</b>
1	Pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum (PJU)	Jumlah tenaga kontrak pemeliharaan PJU sebanyak 20 orang selama 12 bulan	Persentase PJU dalam kondisi baik (80%)
2	Penataan beban kelistrikan (PJU)	Jumlah pembangunan jaringan baru PJU (150 kwh meter baru, 12.000 meter jaringan PJU baru)	Persentase PJU dalam kondisi baik (80%)
3	Pembangunan penerangan jalan umum	Jumlah PJU yang terbangun sebanyak 100 titik lampu baru	Persentase PJU dalam kondisi baik (80%)
4	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan selama 12 bulan	Prosentase terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME
5	Pengadaan sarana dan prasarana pemel. Penerangan jalan umum	Pengadaan alat sarana dan prasarana pemel PJU sebanyak 1 buah	Persentase PJU dalam kondisi baik (80%)
6	Pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya	Jumlah pengadaan PJU tenaga surya sebanyak 6 titik PJUTS baru	Persentase PJU dalam kondisi baik (80%)
<b>I</b>	<b>Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan</b>		<b>Capaian pelayanan bidang pertanahan (100%)</b>
1	Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Jumlah konflik pertanahan yang difasilitasi sebanyak 4 kali	Persentase capaian pelayanan bidang pertanahan
<b>J</b>	<b>Program Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan</b>		<b>Persentase bangunan gedung pemerintahan yang terbangun/direhab (100%)</b>
1	Perencanaan pembangunan gedung pemerintahan	Jumlah DED Pembangunan Gedung Pemerintahan sebanyak 1 paket	Prosentase tersedianya DED Pembangunan gedung pemerintahan sesuai NSPM
2	Pembangunan Gedung Pemerintahan	Jumlah gedung pemerintahan yang dibangun (1 lokasi)	Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi (65%)
3	Perencanaan Rehabilitasi gedung pemerintahan	Jumlah DED Rehab. Gedung Pemerintahan sesuai NSPM sebanyak 2 paket	Prosentase tersedianya DED Rehabilitasi gedung pemerintahan yang sesuai NSPM
4	Rehabilitasi gedung pemerintahan	Jumlah gedung pemerintahan yang direhab. (1 lokasi)	Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi (65%)
<b>K</b>	<b>Program Pembangunan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum</b>		<b>Persentase sarana air bersih yang terbangun (100%)</b>
1	Perencanaan Pembangunan Jaringan Air bersih/air minum	Jumlah DED Pemb. Jaringan Air Bersih/air minum sesuai NSPM sebanyak 1 paket	Prosentase tersedianya DED Pembangunan Jaringan Air Bersih/air minum sesuai NSPM
2	Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Jumlah pembangunan jaringan air bersih/air minum (8 paket)	Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih (65%)
3	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM IKK) sebanyak 2 SPAM IKK	Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih (65%)
4	Perencanaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah DED Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai NSPM sebanyak 1 paket	Prosentase tersedianya DED Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) sesuai NSPM
5	Pembinaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM)	Pelaksanaan pembinaan HIPPAM (1 kali)	Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih (65%)
<b>L</b>	<b>Program Pembangunan Saluran Drainase</b>		<b>Persentase panjang drainase di perumahan dan kel./desa dalam kondisi baik (65%)</b>
1	Pembangunan saluran drainase	Jumlah pembangunan saluran drainase (6 paket)	Persentase KK yang memiliki Rumah Layak Huni (72%)
2	Perencanaan saluran drainase	Jumlah DED pemb. Saluran drainase sesuai NSPM sebanyak 1 paket	Prosentase tersedianya DED saluran drainase sesuai NSPM
<b>M</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Umum</b>		<b>Jumlah lampu PJU yang menyala (3600 unit)</b>
1	Penyediaan jasa rekening listrik PLN (PJU)	Jumlah pembayaran rekening listrik PJU selama 12 bulan	Persentase PJU dalam kondisi baik (80%)

NO	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	INDIKATOR KINERJA OUTCOME
<b>N</b>	<b>Program Pembangunan infrastruktur perdesaan</b>		<b>Persentase Jalan lingkungan di Perumahan dan Kel./desa dalam kondisi baik (70%)</b>
1	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan	Jumlah DED Infrastruktur permukiman dan perumahan yang sesuai NSPM (2 paket)	Prosentase tersedianya DED Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan perumahan
2	Pembangunan Infrastruktur Permukiman dan Perumahan	Jumlah pembangunan Infrastruktur permukiman dan perumahan (3 paket)	Persentase KK yang memiliki Rumah Layak Huni (72%)
<b>O</b>	<b>Program Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum/pemerintah</b>		<b>Persentase bangunan pasar sayur yang terbangun (100%)</b>
1	Pembangunan pasar sayur	Jumlah pasar sayur yang dipelihara (1 lokasi)	Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi (65%)
<b>P</b>	<b>Pembangunan rumah sakit</b>		<b>Persentase bangunan gedung rumah sakit yang terbangun (100%)</b>
1	Pembangunan rumah sakit	Jumlah rumah sakit yang terbangun (1 lokasi)	Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi (65%)
2	Perencanaan Pembangunan Rumah Sakit	Jumlah DED rumah sakit sesuai NSPM (1 paket)	Prosentase tersedianya DED Rumah sakit sesuai NSPM
<b>Q</b>	<b>Program Pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan</b>		<b>Persentase kontrak/SPK yang tersedia (100%)</b>
1	Penunjang pengadaan barang/jasa	Terlaksananya kegiatan pengadaan barang/jasa (1 orang)	Prosentase dokumen kontrak (SPK) yang tersedia

### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi/Sasaran

Akuntabilitas adalah suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia Birokrasi, Akuntabilitas suatu Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi Instansi bersangkutan.

Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2017, realisasi kinerja tahun 2017 dengan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2016), serta realisasi kinerja tahun 2017 dengan target akhir Renstra 2016-2021.

Adapun cara menghitung capaian indikator kinerja dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

1. Rumus 1 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{tingkat capaian} = \frac{\text{Prosentase Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Rumus 2 : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin rendah, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{tingkat capaian} = \frac{\text{Prosentase Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan pemberian atribut pada capaian masing-masing indikator kinerja, dengan kriteria yaitu :

No	Nilai Capaian Kinerja		Pemberian Atribut
	%	Keterangan Prosentase	
1	85% sd 100%	Delapan puluh lima persen sampai dengan seratus persen	Sangat Berhasil
2	70% sd < 85%	Tujuh puluh persen sampai dengan kurang dari delapan puluh lima persen	Berhasil
3	55% sd < 70%	Lima puluh lima persen sampai dengan kurang dari tujuh puluh persen	Cukup Berhasil
4	< 55%	Dibawah lima puluh lima persen	Tidak Berhasil

**B. Analisa Capaian Kinerja Berdasarkan Target Dan Realisasi Tahun 2017**

Analisa dan evaluasi dilakukan terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang. Hal ini akan bermanfaat untuk penyempurnaan/ perbaikan perencanaan dan penanganan atau peningkatan kinerja di masa mendatang. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri selama Tahun 2017 dapat disampaikan sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Pencapaian Kinerja mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri  
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target RPJMD Tahun 2017 (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1.	Persentase penduduk dengan akses berkelanjutan terhadap air minum yang layak	65	73,61	113,24
2.	Persentase penurunan luasan kawasan kumuh	75	82,76	89,65

Catatan :

- Kolom Target RPJMD 2015 berasal dari Dokumen RPJMD Lampiran-4 tentang Indikator Kinerja
- Data Indikator No. 1 merupakan data dari Bidang Pemberdayaan dan Sanitasi Lingkungan Dinas Kesehatan Kab. Kediri

Tabel 3.2  
Data Realisasi Kinerja Sasaran Renstra  
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri  
Tahun 2017

No	Indikator Kinerja	Target 2017	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih	65	73,25	112,69
2	Persentase KK yang memiliki rumah layak huni	72	70,45	97,85
3	Persentase PJU dalam kondisi baik	80	80	100
4	Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi	65	0	0
5	Luasan kawasan Kumuh yang tertangani	6,5	4,48	68,92

Catatan : Indikator 1 sumber dari Dinkes Kab. Kediri, diolah.

**Kinerja Utama : Meningkatnya sarana infrastruktur daerah**

Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri tahun 2017, sebagaimana yang tertuang pada Renstra dapat dijelaskan dari 5 (lima) indikator kinerja sebagai berikut :

**1. Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih**

Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih tahun 2017 adalah 73,25%, melebihi dari target yaitu 65%. Sehingga capaian tahun 2017 untuk indikator ini adalah 112,69% atau **Sangat Berhasil**. Data yang digunakan adalah data jumlah rumah tangga/KK yang mendapatkan akses air bersih dibagi jumlah seluruh KK di Kab. Kediri. Sesuai dengan tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri, yaitu dalam hal pembangunan infrastruktur jaringan air bersih/air minum.

Program dan kegiatan yang mendukung capaian indikator kinerja ini sebagai berikut :

**1. Program Lingkungan Sehat Perumahan****a. Pendukung penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat.**

Anggaran pada kegiatan ini digunakan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan fisik yang didanai oleh pemerintah pusat yaitu program PAMSIMAS. Sasaran desa PAMSIMAS untuk tahun 2017 sebanyak 10 desa yaitu sebagai berikut :

**a. PAMSIMAS APBN**

1. Ds. Puhsarang Kec. Semen (KKM Tirto Kamandanu)
2. Ds. Puhrubuh Kec. Semen (KKM Bagrug Asri)
3. Ds. Kampungbaru Kec. Kepung (KKM Tirto Mulyo)
4. Ds. Petok Kec. Mojo (KKM Sumber Makmur)
5. Ds. Pamongan Kec. Mojo (KKM Sumber Wilis)
6. Ds. Joho Kec. Semen (KKM Podang Makmur)
7. Ds. Ploso Kec. Mojo (KKM Ploso Semini)
8. Ds. Surat Kec. Mojo (KKM Surat Bersemi)

**b. Bansos Pamsimas APBD**

1. Ds. Jugo Kec. Mojo (HIPPAM Jugo Asri)
2. Ds. Ponggok Kec. Mojo (HIPPAM Pandan Sari)

**2. Program Pembangunan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum****a. Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum**

Pelaksanaan pekerjaan fisik sebanyak 8 paket, sumber dana DAK, sebagai berikut :

1. Pembangunan SPAM Desa Bukur Kec. Kandangan Kab. Kediri
2. Pembangunan SPAM Desa Banaran Kec. Kandangan Kab. Kediri
3. Pembangunan SPAM Desa Kandangan Kec. Kandangan Kab. Kediri
4. Pembangunan SPAM Desa Jerukgulung Kec. Kandangan Kab. Kediri



5. Pembangunan SPAM Ds. Tarokan Kec. Tarokan Kab. Kediri
  6. Pembangunan SPAM Ds. Jarak Kec. Plosoklaten Kab. Kediri
  7. Pembangunan SPAM Ds. Parang Kec. Banyakan Kab. Kediri
  8. Pembangunan SPAM Ds. Jerukwangi Kec. Kandangan Kab. Kediri
- b. Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1. Pembangunan Sumur Uji IKK Ngancar Kab. Kediri
  2. Optimalisasi SPAM IKK Grogol akibat bencana banjir bandang
- c. Perencanaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Sistem Penyediaan air minum.
- Kegiatan ini digunakan untuk perencanaan Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum. Terlaksana sebanyak 2 paket perencanaan untuk kegiatan fisik tahun berkenaan yaitu tahun 2017.

- d. Pembinaan Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM)
- Kegiatan Pembinaan atau sosialisasi HIPPAM yang direncanakan sebanyak 1 kali, sampai dengan akhir tahun 2017 tidak terealisasi dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

PERMASALAHAN :

- Sebagian pembinaan HIPPAM telah dilakukan oleh fasilitator PAMSIMAS.
- Ada peralihan tanggung jawab personil pelaksana kegiatan (Satu Kepala Seksi menerima tanggung jawab untuk kegiatan 2 seksi, sehingga terjadi kelebihan beban pekerjaan).

SOLUSI :

- Usulan tambahan tenaga, sehingga proses pekerjaan berjalan lebih maksimal dan lancar.
- Melakukan perencanaan lebih cermat, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018.

2. Persentase KK yang memiliki rumah layak huni

Persentase KK yang memiliki rumah layak huni yaitu 70,45% dari jumlah KK seluruh kabupaten Kediri. Jumlah KK yang digunakan adalah data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kediri. Target pada tahun 2017 adalah 72%. Jadi capaian tahun 2017 sebesar 97,85% atau **Sangat Berhasil**.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja ini sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan
  - a. Fasilitasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Peningkatan Kualitas Perumahan (PKP).

Kegiatan ini merupakan pendukung dari kegiatan pusat yaitu BSPS. Kegiatan utamanya yaitu Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), untuk meningkatkan prakarsa Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana, dan utilitas. Tujuan yaitu terbangunnya rumah yang layak huni oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang didukung dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan. Kegiatan BSPS yang dilakukan pada tahun 2017 sebagai berikut :

1. Pembangunan Baru (PB) sebanyak 74 unit, dengan rincian :
  - Ds. Bulusari Kec. Tarokan sebanyak 30 unit
  - Ds. Dawuhan Kec. Purwoasri sebanyak 20 unit
  - Ds. Watugede Kec. Puncu sebanyak 10 unit
  - Ds. Sidomulyo Kec. Puncu sebanyak 14 unit
2. Peningkatan Kualitas (PK) sebanyak 365 unit, dengan rincian :
  - Ds. Jugo Kec. Mojo sebanyak 50 unit
  - Ds. Kranding Kec. Mojo sebanyak 100 unit
  - Ds. Kroton Kec. Mojo sebanyak 67 unit
  - Ds. Maesan Kec. Mojo sebanyak 60 unit
  - Ds. Mondo Kec. Mojo sebanyak 39 unit
  - Ds. Sukoanyar Kec. Mojo sebanyak 49 unit

3. Persentase PJU dalam kondisi baik

Persentase PJU dalam kondisi baik adalah 80%. Target tahun 2017 sebesar 80%, jadi capaian kinerja PJU dalam kondisi baik sebesar 100% atau **Sangat Berhasil**. Yang dimaksud PJU dalam kondisi baik adalah PJU yang berada dalam kondisi baik dan menyala. Penerangan Jalan Umum merupakan bagian penting dari tupoksi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

- a. Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan
  1. Pemeliharaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum (PJU).

Terlaksananya pemeliharaan PJU selama 12 bulan terdiri dari pembayaran honor 20 tenaga pemeliharaan PJU, belanja bahan bakar minyak/gas kendaraan operasional PJU, belanja suku cadang alat listrik PJU dll.
  2. Penataan beban kelistrikan (PJU).

Terlaksananya pembangunan jaringan baru PJU yaitu 150 kwh meter baru, 12.000 meter jaringan PJU baru.

3. Pembangunan penerangan jalan umum.
    - Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) se Wilayah Kab.Kediri (100 titik lampu baru).
  4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.
  5. Pengadaan sarana dan prasarana pemeliharaan penerangan jalan umum.
    - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF sebanyak 1 unit
  6. Pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya.
    - Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (TS) di wilayah Kab. Kediri (6 titik PJUTS baru)
- b. Program Pelayanan Administrasi Umum
1. Penyediaan Jasa Rekening Listrik PLN ( PJU).
    - Pembayaran rekening listrik PJU (PLN Area Kediri)
    - Pembayaran rekening listrik PJU (PLN Area Mojokerto)

Disamping program dan kegiatan diatas, pencapaian target kinerja PJU didukung pula oleh kegiatan Penyusunan SPM dan SOP Penerangan Jalan Umum (PJU) Kabupaten Kediri yang dilakukan pada tahun 2017. Berdasarkan SOP yang telah disusun semoga bisa menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan kegiatan sehingga pelayanan PJU dapat lebih optimal terutama dalam merespon pengaduan dari masyarakat terkait Penerangan Jalan Umum (PJU).

#### 4. Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi

Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi tahun 2017 sebesar 0%. Target yang hendak dicapai adalah 65%. Jadi capaian untuk kinerja ini adalah 0% atau **Tidak Berhasil**.

Hal ini disebabkan di Kabupaten Kediri, dalam hal pembangunan gedung pemerintahan belum disertai dengan kewajiban adanya Sertifikat Laik Fungsi. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah RI No. 36 Tahun 2005 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, Pasal 1 disebutkan bahwa "Laik fungsi adalah suatu kondisi bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung yang ditetapkan. Persyaratan administratif bangunan gedung meliputi: a) status hak atas tanah, dan/atau izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah, b) status kepemilikan bangunan gedung; dan c) izin mendirikan bangunan gedung. Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan bangunan gedung.

Apabila penghitungan dilakukan secara manual, akan menemui kesulitan terutama menentukan keandalan bangunan gedung. Disamping itu banyak aspek

yang harus dinilai untuk menyatakan suatu bangunan laik fungsi atau tidak. Jadi, perlu adanya kebijakan terkait hal tersebut dan kerjasama antar dinas terkait. Hal yang pertama harus dilakukan yaitu pembentukan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG). Penetapan Tim TABG berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri. Tim tersebut yang berhak menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi. Dan leading sector untuk penerbitan Sertifikat Laik Fungsi adalah DPM2TSP Kab. Kediri.

Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan terkait pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

a. Program Pembangunan Gedung Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan Gedung Pemerintahan

Terlaksananya perencanaan sebanyak 1 paket yaitu perencanaan untuk kegiatan fisik tahun 2018 sebagai berikut :

- Perencanaan Teknis Review DED Pembangunan Gedung Sekretariat Dewan Kab.Kediri

2. Pembangunan Gedung Pemerintahan.

Terlaksananya pembangunan fisik gedung pemerintahan sebanyak 1 lokasi yaitu :

- Pembangunan Gedung Kantor BPKAD dan Infrastruktur Pendukung Kabupaten Kediri

3. Perencanaan Rehabilitasi Gedung Pemerintahan.

4. Rehabilitasi Gedung Pemerintahan.

Terlaksananya Rehab.gedung pemerintahan sebanyak 1 lokasi yaitu :

- Rehabilitasi Monumen Simpang Lima Gumul (SLG) Tahap I

5. Luasan kawasan Kumuh yang tertangani

Luasan kawasan kumuh yang tertangani yaitu luas kawasan kumuh yang berhasil ditangani selama tahun 2017 dengan program dan kegiatan yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab. Kediri. Total Luas kawasan kumuh yaitu berdasarkan SK Bupati Kediri yaitu 25,98 Ha. Target luasan kawasan kumuh yang tertangani tahun 2017 yaitu 6,5 Ha. Realisasi penanganan kumuh sebesar 4,48 Ha. Jadi capaian sebesar 68,92% atau **cukup berhasil**.

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja ini adalah sebagai berikut :

a. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

1. Pendukung Kegiatan Penanganan Kawasan Kumuh

Terlaksananya kegiatan pendukung penanganan kawasan kumuh selama 12 bulan. Kegiatan utama yaitu kegiatan "KOTAKU" drai pemerintah pusat. Fisik pekerjaan dari Pemerintah Pusat dilaksanakan di satu lokasi yaitu :

- Ds. Tulungrejo Kec. Pare

### C. REALISASI ANGGARAN

Dalam Tahun Anggaran 2017, Realisasi anggaran untuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sebesar Rp. 201.662.030.702,00 (Dua ratus satu milyar enam ratus enam puluh dua juta tiga puluh ribu tujuh ratus dua rupiah) atau sebesar 87,33%, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Anggaran DPKP Tahun 2017**

No	Kegiatan	Target ( Rp. )	Realisasi (Rp)	% Keu
1	2	3	4	5
I	<b><u>Pendapatan :</u></b>			
	Jumlah	0,00	0,00	0,00
II	<b><u>Belanja Tidak Langsung :</u></b>			
	1. Belanja Gaji dan Tunjangan	2.620.982.700	2.211.536.372	84,38
	2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.094.000.000	688.754.506	62,96
	<b>Jumlah</b>	<b>3.714.982.700</b>	<b>2.900.290.878</b>	<b>78,07</b>
III	<b><u>Belanja Langsung :</u></b>			
	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	445.921.500	399.635.738	89,62
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	65.580.600	47.681.500	72,71
	3. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	54.100.000	49.138.000	90,83
	4. Pengembangan Perumahan	430.000.000	302.064.202	70,25
	5. Lingkungan Sehat Perumahan	161.790.000	68.912.435	42,59
	6. Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	150.000.000	34.010.000	22,67
	7. Pemberdayaan Komunitas Perumahan	200.000.000	111.626.663	55,81
	8. Pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan	3.651.000.000	3.327.842.243	91,15
	9. Penyelesaian konflik konflik pertanahan	100.000.000	0	0,00
	10. Pembangunan Bangunan Gedung Pemerintahan	29.147.140.000	25.534.641.715	87,61
	11. Pembangunan dan Pengembangan Penyediaan Air Minum	5.350.752.740	4.266.784.000	79,74
	12. Pembangunan Saluran Drainase			
	13. Pelayanan Administrasi Umum	695.000.000	620.631.450	89,30
	14. Pembangunan infrastruktur perdesaan	33.600.000.000	32.716.755.378	97,37
	15. Pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas umum/pemerintah	460.000.000	419.909.500	91,28
	16. Pembangunan rumah sakit	2.500.000.000	2.253.288.000	90,13
	17. Pengendalian administrasi dan pelaksanaan pembangunan	150.165.000.000	128.599.839.000	85,64
		35.000.000	8.980.000	25,66
	<b>Jumlah</b>	<b>227.211.284.840</b>	<b>198.761.739.824</b>	<b>87,48</b>
	<b>Total ( II+III )</b>	<b>230.926.267.540</b>	<b>201.662.030.702</b>	<b>87,33</b>

## **BAB IV**

### **P E N U T U P**

#### **A. KEBERHASILAN KEGIATAN**

Dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017 sebagaimana terlihat dalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang dilaksanakan, berarti telah selesai proses pembangunan atau kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2017, dengan hasil yang memuaskan.

#### **B. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA YANG BERKAITAN DENGAN PENCAPAIAN KINERJA**

Dalam pencapaian Kinerja suatu Instansi tak pernah terlepas dari kendala/permasalahan yang harus dihadapi. Adapun kendala/permasalahan utama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan tenaga PNS, banyak jabatan maupun staf yang kosong dan pegawai PNS yang purna tugas, sehingga memperlambat penyelesaian beban kerja.
2. Kurangnya sarana dan prasarana kerja diantaranya komputer, printer, meja kursi dll yang berakibat menghambat penyelesaian beban kerja.
3. Keterbatasan anggaran sehingga kegiatan pembangunan, perbaikan dan rehabilitasi belum menjangkau kebutuhan infrastruktur yang layak.
4. Belum tersedianya database bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagai acuan pelaksanaan arah program dan kegiatan.

#### **C. SOLUSI/LANGKAH YANG DIAMBIL UNTUK MENINGKATKAN KINERJA**

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya di lingkup bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bidang Cipta Karya dan bidang Pertanahan dan Kawasan Permukiman Kumuh yang diemban oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan perencanaan pembangunan di Kabupaten Kediri sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan sesuai dengan visi dan misi SKPD, melalui :
  - a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur;

- b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
  - c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
  - d. Mengusulkan penambahan karyawan yang bertugas dilapangan.
2. Mengusulkan dan menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana aparatur sehingga mempercepat penyelesaian pekerjaan.
3. Dengan keterbatasan dana yang ada, berusaha semaksimal mungkin untuk menentukan skala prioritas dan mengoptimalkan sumber daya yang ada.
4. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja / anggaran dari pola "top down" menjadi "bottom up" sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi.
5. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan masalah - masalah aktual di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat khususnya di lingkup Sub Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
6. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kediri akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan.
7. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dunia usaha dan civil society.

#### **D. SARAN**

Dengan tersusunnya Laporan ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja yang telah dicapai tahun 2017 dan dimanfaatkan sebagai penjabaran pelaksanaan TUPOKSI di tahun berikutnya, sebagai saran :

1. Laporan ini agar dapat dipahami oleh semua aparat di lingkungan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dan perlu dikomunikasikan secara terus menerus sehingga dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan program di masa yang akan datang secara optimal.

2. Penyempurnaan dan perbaikan (revisi) Rencana Strategis (Renstra) dan penyempurnaan penyusunan indikator kinerja perlu mendapatkan perhatian, supaya suatu rencana dapat dilaksanakan secara optimal dan berkesinambungan.
3. Meskipun LKjIP ini disusun secara cermat dengan melibatkan seluruh aparat yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, namun disadari masih terdapat banyak kekurangan, untuk hal tersebut saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan dalam rangka untuk penyempurnaan.

Kediri, Desember 2017

Kepala Dinas Perumahan  
dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Kediri



**Ir. EDY YUWONO, MT.**

Pembina Tk. I

NIP. 19610806 198903 1 017



**Lampiran 1**  
**MATRIKS RENSTRA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**  
**KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016-2021**

**Visi Bupati :**

"Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur Pemerintah yang Profesional"

**Misi Bupati ke 12 :**

Membangun infrastruktur penunjang pembangunan di berbagai bidang

**Tujuan :**

"Meningkatkan sarana prasarana infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman"

**Sasaran :**

- a. Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih
- b. Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan, mencakup :
  1. Meningkatnya KK yang memiliki Rumah Layak Huni
  2. Meningkatnya PJU dalam kondisi baik
  3. Meningkatnya bangunan pemerintahan layak fungsi
  4. Luasan kawasan kumuh yang tertangani

NO	Indikator	Formula Perhitungan	Kondisi Kinerja pada awal periode Renstra	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
			Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga/KK yang terlayani air bersih}}{\text{Jumlah KK di Kab. Kediri}} \times 100\%$	54	65	75	85	95	100	100
2	Persentase KK yang memiliki rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah/KK layak huni}}{\text{Jumlah KK di Kab. Kediri}} \times 100\%$	70	72	75	77	79	80	80
3	Persentase PJU dalam kondisi baik	$\frac{\text{Jumlah PJU yang menyala dan baik}}{\text{Jumlah PJU yang ada}} \times 100\%$	80	80	85	90	92	95	95
4	Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi	$\frac{\text{Jumlah bangunan gedung pemerintahan layak fungsi}}{\text{Jumlah bangunan gedung pemerintahan yang ada}} \times 100\%$	60	65	70	80	85	90	90
5	Luasan kawasan kumuh yang tertangani	Luas kawasan kumuh yang tertangani (Ha)	0	6,5	12,99	18,19	20,78	25,98	25,98

**PERUBAHAN  
RENCANA KINERJA TAHUNAN**

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. KEDIRI  
TAHUN ANGGARAN : 2017

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	1. Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih	65%
Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan	1. Persentase KK yang memiliki Rumah Layak Huni	72%
	2. Persentase PJU dalam kondisi baik	80%
	3. Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi	65%
	4. Luas kawasan kumuh yang tertangani	6,5 Ha

Kediri, Juni 2017  
KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KEDIRI

Ir. EDY YUWONO, MT  
Pembina Tk. I  
NIP. 19610806 198903 1 017

## PENGUKURAN KINERJA

SKPD : DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. KEDIRI  
TAHUN ANGGARAN : 2017

Kinerja Utama	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	1. Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih	65%	73,25%	112,69%
Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan	1. Persentase KK yang memiliki Rumah Layak Huni	72%	70,45%	97,85%
	2. Persentase PJU dalam kondisi baik	80%	80%	100%
	3. Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi	65%	0%	0%
	4. Luas kawasan kumuh yang tertangani	6,5 Ha	4,48 Ha	68,92%

Kediri, Desember 2017  
KEPALA DINAS PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN KEDIRI

**Ir. EDY YUWONO, MT**  
Pembina Tk. I  
NIP. 19610806 198903 1 017

**PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2017**

Sasaran/Program	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian	Alokasi	Realisasi	Capaian	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap air bersih	1. Persentase rumah tangga/KK yang terlayani air bersih	65%	73,25%	112,69%	5.512.542.740,00	4.335.696.435,00	78,65%	34,04
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT PERUMAHAN	Persentase sarana air bersih yang terbangun	100%	100%	100%	161.790.000,00	68.912.435,00	42,59%	
PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase sarana air bersih yang terbangun	100%	100%	100%	5.350.752.740,00	4.266.784.000,00	79,74%	
Meningkatnya kualitas hunian dan bangunan pemerintahan	1. Persentase KK yang memiliki rumah layak huni	72%	70,45%	97,85%	430.000.000,00	302.064.202,00	70,25%	27,60
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase MBR yang memiliki Rumah Layak Huni	70%	70,45%	100,64%	430.000.000,00	302.064.202,00	70,25%	
	2. Persentase PJU dalam kondisi baik	80%	80%	100%	37.251.000.000,00	36.044.597.621,00	96,76%	3,24
PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BIDANG KETENAGALISTRIKAN	Jumlah lampu PJU yang menyala	3600 unit	3600 unit	100%	3.651.000.000,00	3.327.842.243,00	91,15%	
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM	Jumlah lampu PJU yang menyala	3600 unit	3600 unit	100%	33.600.000.000,00	32.716.755.378,00	97,37%	
	3. Persentase bangunan pemerintahan layak fungsi	65%	0%	0%	29.147.140.000,00	25.534.641.715,00	87,61%	-87,61
PROGRAM PEMBANGUNAN GEDUNG PEMERINTAHAN	Persentase bangunan gedung pemerintahan yang terbangun / direhab	100%	100%	100%	29.147.140.000,00	25.534.641.715,00	87,61%	
	4. Luasan kawasan kumuh yang tertangani	6,5 Ha	4,48 Ha	68,92%	895.000.000,00	732.258.113,00	81,82%	-12,90
PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	Capaian pendukung Program "Kota Ku"	100%	100%	100%	200.000.000,00	111.626.663,00	55,81%	
PROGRAM PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE	Persentase panjang drainase di perumahan dan kel./desa dalam kondisi baik	65%	-	-	695.000.000,00	620.631.450,00	89,30%	

Kediri, Desember 2017  
 KEPALA DINAS PERUMAHAN  
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 KABUPATEN KEDIRI

**Ir. EDY YUWONO, MT**  
 Pembina Tk. I  
 NIP. 19610806 198903 1 017